

Judul : Untuk Mencegah Tingginya Angka Kecelakaan DPR Usulkan Pemudik Sepeda Motor Lintas Provinsi Dilarang
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Untuk Mencegah Tingginya Angka Kecelakaan **DPR Usulkan Pemudik Sepeda Motor Lintas Provinsi Dilarang**

Memasuki Ramadan, muncul usulan agar Pemerintah mengkaji aturan pemudik yang menggunakan sepeda motor atau roda dua dilarang mudik lintas provinsi. Usulan ini pun mendapat respons beragam.

Usulan itu datang dari Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, saat rapat bersama Kementerian Perhubungan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2/2026). Huda menilai, hal itu penting dikaji karena sebagian besar kecelakaan pada saat mudik lebaran itu melibatkan sepeda motor.

"Angkutan lebaran yang hampir 50 persen kecelakaan kecelakaan

diakibatkan dari pengguna sepeda motor, ini saya mohon dikaji ulang apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik lebaran terutama yang lintas provinsi," ujar Huda.

Politisi PKB itu mengatakan, Kemenhub masih memiliki waktu sebelum musim mudik tahun ini berlangsung sebagai upaya menekan angka kecelakaan. "Ini bisa dikaji, karena untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang hampir dari lebaran ke lebaran cukup tinggi sekali," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dewan

Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berpandangan, mudik menggunakan sepeda motor sangat tidak dianjurkan karena risiko kecelakaan yang tinggi. Terutama, kata dia, jika membawa muatan barang berlebih atau berboncengan lebih dari satu orang.

"Penyediaan bus gratis dan kemudahan pendaftarannya adalah solusi kunci untuk mengalihkan pemudik motor ke moda yang lebih aman," ujar Djoko, kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (19/2/2026).

Dia menambahkan, sepeda motor tetap menjadi pilihan karena jauh lebih ekonomis dibanding tiket transportasi umum yang

harganya melonjak dua kali lipat saat Lebaran. Selain faktor biaya, pemudik memilih motor demi fleksibilitas waktu istirahat.

"Meskipun risiko kecelakaan tetap membayangi sepanjang perjalanan," ungkapnya.

Namun, dia juga menyoroti fenomena kursi kosong pada mudik gratis akibat pendaftaran ganda. Menurut dia, hal itu perlu segera diatasi melalui integrasi sistem.

"Integrasi seluruh penyelenggara ke dalam satu platform tunggal milik Kemenhub akan mencegah pendaftaran fiktif dan mempermudah masyarakat," katanya.

Berbeda, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) Rio Priambodo tidak setuju jika ada larangan bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk lintas provinsi. Menurut dia, jika harus menerapkan kebijakan tersebut, sebaiknya Pemerintah sudah menyiapkan solusi lainnya.

"Seperti mudik gratis bagi pemudik atau Pemerintah memberi subsidi bagi transportasi umum yang bisa terjangkau tarifnya," ungkap Rio kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (18/2/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Djoko Setijowarno dan Rio Priambodo mengenai usulan larangan pemudik dengan sepeda motor lintas provinsi, berikut wawancaranya.

DJOKO SETIJOWARNO, Dewan Penasihat MTI Pusat

Saya Dukung, Untuk Keselamatan Pemudik



FOTO: INSTAGRAM PERBASA

“

Hal ini penting untuk menegaskan aturan keselamatan sekaligus melindungi anak-anak dari risiko tinggi kecelakaan lalu lintas.

Bagaimana Anda melihat usulan larangan mudik dengan sepeda motor dengan kategori antar provinsi?

Saya mendukung usulan tersebut, sebab angka kecelakaan tinggi dan tidak efisien. Hal ini penting untuk menegaskan aturan keselamatan sekaligus melindungi anak-anak dari risiko tinggi kecelakaan lalu lintas.

Anggaran mudik gratis sepeda motor sebaiknya dialihkan untuk menambah kuota bus, mengingat selama ini penyerapannya kurang dari satu persen dan tidak efektif mengurangi kepadatan motor di jalan raya. Lagipula, ketersediaan sepeda

motor di daerah sudah melimpah sehingga pemudik tetap bisa bersilaturahmi menggunakan kendaraan milik keluarga atau jasa sewa lokal.

Bagaimana dengan program mudik gratis dengan tujuan mengurangi pemudik dengan sepeda motor?

Mudik bareng itu juga masih bermasalah. Harusnya satu platform, jangan banyak-banyak. Saya pernah dua tahun lalu blusukan melihat bus mudik gratis, isinya itu tidak sampai 70 persen. Pernah suatu waktu, 8 bus gak berangkat, karena tidak ada peminatnya. Padahal sudah daftar semuanya.

Kenapa hal itu bisa terjadi?

Ya karena tidak ada sanksinya. Mestinya hanya satu platform saja. Namun masyarakat tinggal memilih saja, mau ikut (instansi) yang mana.

Penanggung jawabnya dikendalikan oleh siapa?

Dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi bisa maksimal. Karena pernah sampai delapan bus kosong dan gak jadi berangkat. Padahal sudah dibayar, jadi sayangkan kalau seperti itu. Bisa jadi laporannya itu lengkap. Jadi sebaiknya platformnya satu saja yakni Kemenhub. Ngapain juga banyak-banyak. ■ NNM

RIO PRIAMBODO, Sekretaris YLKI

Larangan Ini Berat, Jika Tak Diringi Solusi



FOTO: INSTAGRAM PERBASA

“

Menurut saya, jika Pemerintah melarang, harus dikasih solusi alternatifnya, sehingga masyarakat punya pilihan lain.

Apa tanggapan Anda dengan usulan larang mudik dengan sepeda motor untuk lintas provinsi?

Mengenai hal tersebut, kami meminta Pemerintah lebih menjamin keselamatan dan kenyamanan berkendara dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Sehingga pemudik, baik motor maupun mobil bisa nyaman dan selamat saat mudik.

Jadi Anda tidak setuju ada larangan bagi sepeda motor untuk mudik lintas provinsi ya?

Iya, tak perlu ada larangan bagi pemudik menggunakan kendaraan

roda dua. Menurut saya, jika Pemerintah melarang, harus dikasih solusi alternatifnya, sehingga masyarakat punya pilihan lain.

Hal lain apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam mengatur mudik lebaran nanti?

Kami meminta Pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana mudik yang handal dan memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pemudik.

Lantas, apakah usulan larangan ini akan memberatkan masyarakat? Ya jelas memberatkan kalau la-

rangan itu tidak dibarengi solusi yang konkret diterima oleh masyarakat.

Solusi yang Anda maksud seperti apa?

Ya misal menyediakan mudik gratis bagi pemudik atau Pemerintah memberi subsidi bagi transportasi umum yang bisa terjangkau tarifnya bagi masyarakat.

Apakah program mudik gratis selama ini efektif?

Pilihan menyediakan mudik gratis dan kontrol harga tiket kebijakan yang logis dan win-win solution bagi masyarakat. ■ NNM